



**SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT UTAMA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 PADA
KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH JAMBI**

LP-70/E/11/2024

12 Juli 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp: 021 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 2520/PW.02.8-SD/11/2024

Jakarta, 12 Juli 2024

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada KPU Provinsi Jambi dan KPU
Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi
Tahun 2023

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jambi

di -

Jambi

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Tahun 2023 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU Nomor 317/PW.02.8-ST/11/2024 tanggal 19 Juni 2024, bersama ini disampaikan hasil evaluasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) satuan kerja di Wilayah Jambi, dapat diuraikan hasil sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 78,65 dengan kategori "BB" atau "Sangat Baik";
 - b. 11 (sebelas) KPU Kabupaten/Kota telah memperoleh nilai SAKIP dengan kategori "BB" atau "Sangat Baik";
2. Uraian catatan atas kelemahan/kekurangan pada tiap-tiap komponen evaluasi implementasi SAKIP dijabarkan lebih rinci di dalam Lembar Kerja Evaluasi masing-masing satuan kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plh. Sekretaris Jenderal,

Nanang Priyatna



Tembusan Yth.:

1. Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal KPU (Sebagai Laporan)

DAFTAR ISI

BAB I	GAMBARAN UMUM	
	A. Dasar Hukum Evaluasi	1
	B. Tujuan Evaluasi	1
	C. Ruang Lingkup Evaluasi	2
	D. Batasan dan Tanggung Jawab	2
	E. Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi	2
	F. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
	G. Data Objek Evaluasi	3
BAB II	URAIAN HASIL EVALUASI	4
	A. Gambaran Umum.....	4
	B. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP.....	6
BAB III	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	13
	B. Saran	14

BAB I

GAMBARAN UMUM

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU Nomor 317/PW.02.8-ST/11/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada KPU Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan dengan tujuan:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;

2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi;
4. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya; dan
6. Periode yang dievaluasi adalah manajemen kinerja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

D. Batasan dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan, dan legalitas data/dokumen berada di pihak KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi. Auditor hanya bertanggung jawab terhadap Simpulan Hasil Evaluasi sebagai hasil pengujian berdasarkan data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pihak KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi.

E. Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yakni pada tanggal 26 s.d 30 Juni 2024, bertempat di Kantor KPU Provinsi Jambi di Jambi.

F. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) atas kesesuaian tujuan yang ditetapkan;
2. Teknik evaluasi yang digunakan adalah konfirmasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program, dan sebagainya.

G. Data Objek Evaluasi

Satuan Kerja	:	KPU Provinsi Jambi
Alamat	:	Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Jambi
Ketua	:	Iron Sahroni
Anggota	:	Edison Fahrul Rozi Suparmin Yatno
Sekretaris	:	Khoirul Bahri Lubis
Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	:	Abdul Azis
Kepala Sub Bagian Perencanaan	:	Ratna Juwita

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen;

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a.) Keberadaan

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.

A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 (satu) tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b.) Kualitas

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

c.) Pemanfaatan

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

B. Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi

Tim Evaluator Inspektorat Utama Setjen KPU telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jambi dengan hasil dan uraian sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **78.65** dengan kategori "**BB**" atau "**Sangat Baik**". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	26.10
b. Pengukuran Kinerja	30	22.50
c. Pelaporan Kinerja	15	10.80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.25
Nilai Evaluasi	100	78.65
Tingkat Akuntabilitas		BB

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja		
a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00
b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	8.10
c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00
Jumlah	30.00	26.10

Catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) serta telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

2) Pengukuran Kinerja

Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengukuran Kinerja		
a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.80
b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	9.00	7.20
a. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment,	15.00	10.50

Sub Komponen	Bobot	Nilai
serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.		
Jumlah	30.00	22.50

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Belum seluruhnya pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- b) Belum seluruhnya pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;

3) Pelaporan Kinerja

Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja		
a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3.00	2.40
b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.15
c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.25
Jumlah	15.00	10.80

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja KPU Provinsi Jambi belum dilakukan revidi;
- b) Laporan Kinerja hanya menampilkan perbandingan realisasi capaian dan target tahun 2023 serta capaian tahun 2022 namun belum menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;

- c) Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misalnya persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat kabupaten/kota dengan persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional;
- d) Belum seluruhnya Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- e) Belum seluruhnya informasi laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7.50	5.25
c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00
Jumlah	25.00	19.25

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu belum seluruhnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

2. KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi

KPU Kabupaten/Kota yang Berkategori “BB” atau “Sangat Baik”

Hasil penilaian atas Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2023	Kategori
1	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	77,40	BB
2	KPU Kabupaten Batanghari	76,35	BB
3	KPU Kabupaten Sarolangun	76,35	BB
4	KPU Kabupaten Kerinci	76,20	BB
5	KPU Kabupaten Muaro Jambi	76,05	BB
6	KPU Kabupaten Bungo	75,60	BB
7	KPU Kabupaten Tebo	75,40	BB
8	KPU Kabupaten Merangin	72,90	BB
9	KPU Kota Sungai Penuh	72,85	BB
10	KPU Kota Jambi	72,05	BB
11	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70,50	BB

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Belum seluruhnya anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai telah dituangkan di dalam rencana aksi dan RKAKL;
- b) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan namun belum tepat waktu;
- c) Rencana Aksi kinerja berjalan dinamis karena capaian belum seluruhnya dipantau secara berkala;
- d) Terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang belum seluruhnya ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- e) Terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan namun belum mencapai kondisi/hasil yang lebih baik;

- f) Belum seluruhnya penetapan target yang ditetapkan dimonitoring melalui rapat internal/pleno mingguan.

2) Pengukuran Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian kecil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- b) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi seperti mutasi/rotasi pegawai terlihat dari perubahan struktur organisasi;
- c) Belum seluruhnya pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- d) Belum seluruhnya pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- e) Belum seluruhnya pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- f) Belum seluruhnya pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu;
- b) Laporan Kinerja hanya menampilkan realisasi capaian dan target tahun 2023 dan capaian 2022, namun belum menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- c) Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pada tingkat pusat, misalnya perbandingan persentase tingkat partisipasi pemilih pada tingkat kabupaten/kota dengan persentase tingkat partisipasi pemilih pada tingkat nasional;

d) Laporan Kinerja belum menginformasikan capaian kinerja dan upaya yang dilakukan terkait kinerja beserta hambatannya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada satuan kerja, namun belum dilaksanakan secara maksimal;
- b) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

Uraian catatan atas kelemahan/kekurangan pada tiap-tiap komponen evaluasi implementasi SAKIP dijabarkan lebih rinci di dalam Lembar Kerja Evaluasi masing-masing satuan kerja.

BAB III
SIMPULAN DAN SARAN

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. KPU Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar **78.65** dengan kategori "**BB**" atau "**Sangat Baik**". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	26.10
b.	Pengukuran Kinerja	30	22.50
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.80
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.25
	Nilai Evaluasi	100	78.65
	Tingkat Akuntabilitas		BB

2. KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi yang Berkategori "**BB**" atau "**Sangat Baik**"

Hasil penilaian atas Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2023	Kategori
1	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	77,40	BB
2	KPU Kabupaten Batanghari	76,35	BB
3	KPU Kabupaten Sarolangun	76,35	BB
4	KPU Kabupaten Kerinci	76,20	BB
5	KPU Kabupaten Muaro Jambi	76,05	BB

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2023	Kategori
6	KPU Kabupaten Bungo	75,60	BB
7	KPU Kabupaten Tebo	75,40	BB
8	KPU Kabupaten Merangin	72,90	BB
9	KPU Kota Sungai Penuh	72,85	BB
10	KPU Kota Jambi	72,05	BB
11	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70,50	BB

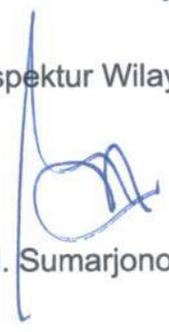
B. Saran

Inspektorat Utama Setjen KPU menyarankan kepada:

1. Sekretaris KPU Provinsi Jambi agar menginstruksikan serta memantau implementasi AKIP pada seluruh jajarannya;
2. Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi untuk melakukan perbaikan atas catatan kelemahan/kekurangan pada komponen berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Plh. Inspektur Wilayah II,



H. Sumarjono



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Alamat : Jl. Kapten Sujono, RT. 010, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota
Jambi

Telp.(0741) 445958

Fax. : (0741) 445958

PERNYATAAN KEBENARAN PENGISIAN KUESIONER EVALUASI PEMILU 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dessy Nur Lisa Lumban Tobing
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Jambi
Alamat Kantor : Jl. Kapten Sujono, RT. 010, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi

dengan ini menyatakan bahwa telah mengisi kuesioner Evaluasi Pemilu tahun 2024
dan mengisi dokumen pendukungnya dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 27 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi


DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Alamat : Jl. Kapten Sujono, RT. 010, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota
Jambi

Telp.(0741) 445958

Fax. : (0741) 445958

PERNYATAAN KEBENARAN PENGISIAN KUESIONER EVALUASI PEMILU 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dessy Nur Lisa Lumban Tobing
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Jambi
Alamat Kantor : Jl. Kapten Sujono, RT. 010, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi

dengan ini menyatakan bahwa telah mengisi kuesioner Evaluasi Pemilu tahun 2024
dan mengisi dokumen pendukungnya dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 27 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING



**LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE) AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
PADA KPU KOTA JAMBI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00				
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Terdapat pedoman tentang Perencanaan Kinerja	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU 3. Renstra KPU Kota Jambi 4. RKT dan Perjanjian Kinerja 5. Rencana Aksi Kinerja 6. Rincian Kertas Kerja Anggaran
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Terdapat Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Terdapat Renstra Tahun 2020 - 2024 KPU Kota Jambi	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Terdapat Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Terdapat Rencana Aksi Kinerja pada KPU Kota Jambi	
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Terdapat Rincian Kertas Kerja Anggaran pada KPU Kota Jambi	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,1		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Perencanaan Kinerja seperti Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi telah diformalkan	1. Renstra KPU Kota Jambi 2. RKT dan Perjanjian Kinerja 3. Rencana Aksi Kinerja 4. IKU 5. SKP
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu pada website KPU Kota Jambi	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen Perencanaan Kinerja seperti IKU Ketua dan Sekretaris telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya dengan memuat cara pengukuran dan sumber data	
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				Visi Misi telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Renstra dan RKT	
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				IKU telah disusun berdasarkan kriteria SMART	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				IKU yang telah disepakati di awal tahun strategis tidak ada perubahan di tahun saat evaluasi	
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Penetapan target yang ditetapkan di monitoring melalui rapat internal/pleno mingguan	
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Penetapan target kinerja pegawai KPU Kota Jambi telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				Penetapan target kinerja pegawai KPU Kota Jambi telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				KPU Kota Jambi telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,5		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai telah dituangkan di dalam Rencana Aksi dan RKAKL	1. Rincian Kertas Kerja Anggaran 2. Perjanjian Kinerja 3. Renstra 4. IKU 5. SKP
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai telah dituangkan di dalam Rencana Aksi dan PK	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				RKT dan Renstra (Target yang ada di dalam RKT) tercapai dan telah sesuai dengan tugas pokok yang ada di dalam Renstra	
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Rencana aksi kinerja belum dipantau secara berkala	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				Sebagian besar telah dilakukan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Terdapat penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				KPU Kota Jambi telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Sebagian besar pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00				
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8		
Kriteria:						

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2023
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Jambi
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,3		
Kriteria:						
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				BA Pleno yang di lampirkan telah menggambarkan pembahasan terkait kinerja	1. BA Pleno dan Notulen
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan melalui Laporan yang dihasilkan dari Aplikasi Sakti, Monev Bappenas	2. IKU 3. PK 4. Renstra 5. Laporan Kinerja KPU Kota Jambi
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan melalui Aplikasi Sakti, Monev Bappenas	6. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jambi 7. Screenshot aplikasi E-Monev Bappenas/E-Monev Kemenkeu
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dari E-Kinerja dan Laporan E-Monev Smart	
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				sebagian besar level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja	
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Aplikasi Sakti, Monev Bappenas, E Monev Kemenkeu	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi Sakti, Monev Bappenas	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5		
Kriteria:						
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				Absen Masuk dan Pulang Kantor tidak tepat waktu dipotong Tukin (Presensi) dan laporan output dalam mengukur kinerja pegawai	1. Presensi dan Daftar Nominatif Tukin 2. IKU
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				sebagian besar Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	3. PK 4. Renstra 5. Laporan Kinerja KPU Kota Jambi
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi seperti Mutasi/Rotasi Pegawai terlihat dari perubahan Struktur Organisasi	6. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jambi 7. Screenshot aplikasi E-Monev Bappenas/E-Monev Kemenkeu
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, contohnya Revisi Anggaran untuk Penyelesaian Sengketa	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Penggunaan anggaran (Realisasi Anggaran) telah digunakan secara efisien dalam capaian kinerja hal ini dapat dilihat melalui aplikasi E-monev Bappenas dan E-Monev Kemenkeu	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				KPU Kota Jambi telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja berupa Presensi dan SKP	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,35		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,4		
Kriteria:						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	1. Laporan Kinerja KPU Kota Jambi
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	2. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jambi
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				Dokumen Laporan Kinerja belum direviu	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	CC	2,7		
Kriteria:						
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		#DIV/0!	#DIV/0!	Laporan Kinerja/LKJ telah disusun mengacu pada Permenpan nomor 53 tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor : No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/2018	1. Laporan Kinerja KPU Kota Jambi 2. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jambi 3. IKU

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				LAKIP telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja tiap program	4. Renstra
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				Laporan Kinerja telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				Laporan Kinerja hanya menampilkan perbandingan realisasi capaian dan target tahun 2023 serta capaian tahun 2022 namun belum menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal prosentasi tingkat partisipasi pemilih kab/kota vs % prosentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.				Laporan Kinerja telah menginfokan capaian kinerja namun masih sebagian kecil menginfokan upaya yang dilakukan beserta hambatanya	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				Sebagian besar Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya, seperti anggaran	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25		
Kriteria:						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Informasi/subtansi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan	1. BA Pleno dan Notulen 2. Laporan Kinerja KPU Kota Jambi 3. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jambi
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Laporan kinerja telah memberikan informasi target kinerja dan anggaran berdasarkan program pada masing-masing sub bagian	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				sebagian besar informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				sebagian besar informasi laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		15,5		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	1. 1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Nomor LAP-104/E/11/2023 tanggal 24 Juli 2023 2. LKE Akuntabilitas Kinerja (RB) 3. Keputusan Sekretaris KPU Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25		
Kriteria:						
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar	1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Nomor LAP-104/E/11/2023 tanggal 24 Juli 2023 2. LKE Akuntabilitas Kinerja (RB) 3. Laporan Evaluasi E-Monev Bappenas/E-Monev Kemenkeu (screenshot aplikasi E-Monev Bappenas/E-Monev Kemenkeu)
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				sebagian besar evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi seperti E-Monev Bappenas, E-Monev Kemenkeu (SMART)	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	C	6,25		
Kriteria:						

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				sebagian kecil tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah mulai dipenuhi	Laporan Kinerja KPU
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				sebagian kecil terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				sebagian kecil hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				sebagian kecil hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				sebagian kecil terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2023			72,05	BB		

Jambi, 28 Juni 2024

Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama

Ketua Tim


Tri Satyo Nugroho


KPU Kota Jambi
 Sekretaris

Dessy Nurlisa Lumben Tobing
 NIP. 197712202007012006

Kasubag Perencanaan Data dan Informasi


Henny Magdalena
 NIP. 197903212009122001